

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi**

###### **2.1.1.1 Pengertian Akuntansi**

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian keadaan ekonomi suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan satu kesatuan sistem informasi pemrosesan data sehingga menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan keadaan perusahaan. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian akuntansi. Menurut Kieso, et al. (2016:2) pengertian akuntansi adalah:

*“Accounting consist of the three basic activities —it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement”.*

Penjelasan di atas dapat diartikan Akuntansi terdiri atas tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara

sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan.

Menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016:3) pengertian akuntansi adalah :

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.

Menurut rizal effendi (2013:3) yaitu :

”akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran serta pelaporan informasi keuangan dalam ukuran moneter (uang) dalam suatu perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan”.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian hasil akhir berupa laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

### **2.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi**

Di dalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis-jenis khusus perkembangan dimana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta penganturan pemerintah. Menurut Rudianto (2012:9) jenis-jenis bidang akuntansi, sebagai berikut:

1. **Akuntansi Manajemen**, yaitu bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan

manajemen menyangkut operasi harian dan perencanaan operasi di masa depan.

2. **Akuntansi Biaya**, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data biaya aktual dan biaya yang direncanakan oleh perusahaan.
3. **Akuntansi Keuangan**, yaitu bidang akuntansi yang bertugas menjalankan segala keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan baik bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan memiliki fungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak di luar perusahaan.
4. **Auditing**, yaitu bidang akuntansi yang memiliki fungsi utama adalah melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan itu sendiri, maka disebut sebagai *internal auditor*. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri. Jika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh di luar perusahaan, maka disebut sebagai auditor *independen* atau akuntan publik.
5. **Akuntansi Pajak**, yaitu bidang akuntansi yang memiliki fungsi utamanya adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lingkup kerja di bidang ini mencakup aktivitas penghitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, hingga perhitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut.
6. **Sistem Akuntansi**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesain dan mengimplementasikan periode serta pengamanan data keuangan pada perusahaan. Tujuan utamanya adalah dari setiap aktivitas bidang ini yaitu mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.
7. **Akuntansi anggaran**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa depan, dengan menggunakan data aktual masa lalu. Di samping itu juga menyusun

rencana kerja, bidang ini juga bertugas mengendalikan rencana kerja tersebut, yaitu seluruh upaya untuk menjamin aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

8. **Akuntansi internasional**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional (transaksi yang melintasi batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang tercakup dalam bidang ini adalah seluruh upaya untuk memahami hukum dan aturan perpajakan setiap negara di masa perusahaan multinasional beroperasi.
9. **Akuntansi sektor publik**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Contohnya mencakup pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo dan sebagainya.

## **2.1.2 Akuntansi Pajak**

### **2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Pajak**

Menurut Agoes dan Estralita (2013:10) pengertian akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Menurut Sukrisno Agoes (2014:10) menjelaskan akuntansi pajak sebagai berikut:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi

komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Adapun Akuntansi Pajak menurut Waluyo (2014:35) adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

### **2.1.2.2 Konsep Dasar Akuntansi Pajak**

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2014 : 11) adalah sebagai berikut :

1. “Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.

5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.”

### **2.1.3 Laporan Keuangan**

#### **2.1.3.1 Definisi Laporan Keuangan**

Kesatuan sistem informasi akuntansi yang melalui proses pengklasifikasian, pencatatan, pengikhtisaran akan menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah disusun mencerminkan keadaan suatu perusahaan. Para ahli mendefinisikan pengertian laporan keuangan sebagai berikut:

Menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016:12) Laporan Keuangan adalah :

“Media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan seperti : pemegang saham, kreditur, serikat pekerja, badan pemerintahan, manajemen”.

Pengertian laporan keuangan menurut Kieso, et al. (2014:2) adalah:

*“Financial statement are the principal means through which a company communicates its financial information to those outside. The financial statements most frequently provided are (1) the statement of financial*

*position, (2) the income statement (or statement of comprehensive income), (3) the statement of cash flows, and (4) the statement of change in equity. Note disclosures are an integral part of each financial statement”.*

Penjelasan diatas dapat diartikan laporan keuangan hanya merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan keuangan yang sering disajikan adalah (1) laporan posisi keuangan, (2) laporan laba-rugi, (3) laporan arus kas, dan (4) laporan perubahan modal. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian intergral dari setiap laporan keuangan.

Selain itu pengertian laporan keuangan menurut PSAK 1 (2015:1.3) adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.

Dari definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi berupa media pengkomunikasian kinerja dan posisi keuangan perusahaan yang didalamnya terdapat laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan atau pengguna laporan keuangan.

### **2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan dibuat bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang kondisi perusahaan pada waktu tertentu kepada para pengguna laporan keuangan.

Para pengguna laporan keuangan menggunakan informasi tersebut untuk memilih alternatif keputusan yang akan diambil.

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 (2015:1.3) adalah :

“Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik”.

Menurut Kieso, et al. (2014:5) laporan keuangan memiliki tujuan:

*"The objective of general-purpose financial reporting is to provide financial information about the reporting entity that is useful to present and potential equity investors, lenders, and other creditors in making decision about providing resources to the entity".* Penjelasan diatas dapat diartikan tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan suatu entitas yang berguna bagi keputusan investor, kreditur, dan kreditur lainnya dalam membuat keputusan mengenai penyediaan sumber daya bagi perusahaan.

### **2.1.3.3 Komponen Laporan Keuangan**

Menurut PSAK 1 (2015:1.3) Komponen Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

- a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- c) Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- d) Laporan arus kas selama periode;
- e) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
- f) Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya;

g) Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

## **2.1.4 Likuiditas**

### **2.1.4.1 Definisi Likuiditas**

Masalah likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya.

Menurut Irham Fahmi (2015:65) definisi likuiditas adalah:

“Kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Contoh: membayar listrik, telepon, air, gaji karyawan, gaji teknisi, gaji lembur, tagihan telepon dan sebagainya. Karena itu rasio likuiditas sering disebut dengan short term liquidity.”

Sedangkan definisi likuiditas menurut Mamduh M. Hanafi dan Halim (2014:37) adalah:

“Kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap utang lancarnya.”

Menurut Kasmir (2015:130) rasio likuiditas adalah:

“Rasio likuiditas atau sering disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek)”.

Sofyan Harahap (2011:301) Rasio Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya, rasio-rasio ini dapat dihubungkan melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan hutang lancar.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu dengan melihat aktiva lancar terhadap utang lancar. Likuiditas dipandang sebagai salah satu ukuran kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan.

#### **2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas**

Penghitungan rasio likuiditas ini cukup memberi manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, baik pihak dalam maupun pihak luar perusahaan.

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas menurut kasmir (2015:132) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek.

2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan.
3. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
4. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
5. Untuk mengukur seberapa besar perputaran kas.
6. Sebagai alat perancangan kedepan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya.
8. Sebagai alat bagi pihak luar terutama yang berkepentingan terhadap perusahaan dalam menilai kemampuan perusahaan agar dapat meningkatkan saling percaya”.

#### **2.1.4.3 Jenis-jenis Rasio Likuiditas**

Jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Rasio lancar (Current Ratio)**

Menurut Irham Fahmi (2015:66) current ratio adalah: “Ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo.

” Menurut Kasmir (2015:134) current ratio adalah:

“Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dalam praktiknya, rasio lancar dengan standar 200% (2:1) yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan.”

$$CR = \frac{\text{current assets}}{\text{current liabilities}}$$

Kasmir (2015:135) mengemukakan bahwa:

“Apabila rasio lancar rendah dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Namun apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu dianggap baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin.”

Pendapat ini sejalan dengan Mamduh dan Abdul Halim (2014:202) yang mengemukakan bahwa:

“*Current ratio* yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadi masalah dalam likuiditas. Sebaliknya, suatu perusahaan yang memiliki rasio lancar terlalu tinggi juga kurang bagus karena menunjukkan banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya mengurangi kemampuan memperoleh laba perusahaan.”

## 2. Rasio Cepat (*Quick Ratio* atau *Acid Test*)

Menurut Kasmir (2015:135) Quick Ratio merupakan:

“Rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi, membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (inventory).”

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

Mamduh dan Abdul Halim (2014:202) mengemukakan bahwa:

“*Quich ratio or Acid Test* lebih baik dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, karena dalam penghitungannya semua unsur-unsur persediaan dikurangkan atau dianggap tidak digunakan untuk membayar utang jangka pendek.”

## 3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Kasmir (2015:138) mendefinisikan rasio kas merupakan:

“Alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat). Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya”.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{cash or cash equivalent}}{\text{Current Liabilities}}$$

Dari beberapa jenis rasio likuiditas yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio lancar (current ratio) dalam mengukur rasio likuiditas. Karena rasio lancar dapat mengukur seluruh total kekayaan perusahaan dengan jumlah uang likuid yang tersedia dalam perusahaan, baik untuk operasional maupun untuk membayar hutang jangka pendek.

#### **2.1.4.4 Current Ratio**

Pemilihan *current ratio* sebagai indikator dalam menentukan tingkat rasio likuiditas karena *current ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Bagi investor sangat penting memperhatikan aset lancar perusahaan karena terdapat akun surat berharga, yang berupa saham dan obligasi yang segera dapat diuangkan atau dijual di bursa efek atau bank.

Menurut Kasmir (2016:134) menyatakan bahwa:

“Rasio lancar atau (*current ratio*) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan.”

## **2.1.5 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

### **2.1.5.1 *Pengertian Corporate Social Responsibility***

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* adalah :

“Tanggung jawab sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Menurut Rahmawati (2012:180) *Corporate Social Responsibility* adalah:

“Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam tanggung jawab operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum.”

Menurut Rusdianto (2013:7) *Corporate Social Responsibility* adalah:

“Konsep dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) mengandung arti bahwa organisasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan diri sendiri (*selfish*). Sehingga terelienasi dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi

kultural dengan lingkungan sosialnya. Konsep ini menyediakan jasa bagi setiap perusahaan untuk melibatkan dirinya dengan dimensi sosial dan memberi perhatian terhadap dampak sosial yang ada.”

Menurut Samuel, Nicholas dan Gupta (2013:9) *Corporate Social Responsibility* adalah:

*“Corporate Social Responsibility is a company’s commitment to operating in an economically, socially, and environmentally sustainable manner, while recognizing the interests of its stakeholder, including investors, costumers, employees, business partner, local communities, the environment, and society at large.”*

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility merupakan komitmen perusahaan dalam menjalankan usahanya sambil memperhatikan kepentingan stakeholder guna meningkatkan taraf ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

#### **2.1.5.2 Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Ada tiga konsep tanggung jawab sosial menurut Untung (2009) dalam Tamba (2011) yang paling berkembang dalam ruang lingkup pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, tanggung jawab sosial perusahaan antara lain selalu dikaitkan dengan kepentingan pemegang saham versus pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja. Kedua, codes seringkali tidak berisi substansi yang nyata dan gagal menempatkan unsur-unsur yang vital untuk implementasi dan penegakkannya. Ketiga, tanggung jawab sosial

perusahaan selalu dikaitkan dengan perlindungan lingkungan hidup. Tanggung jawab sosial perusahaan diartikan sebagai perangkat kebijakan yang komprehensif, praktek dan program yang terintegrasi dalam kegiatan bisnis, jaringan pemasok dan proses pengambilan keputusan di seluruh perusahaan dimanapun perusahaan itu menjalankan kegiatannya, dan termasuk tanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang diambil pada masa lalu dan sekarang, dan implikasinya di masa depan.

Salah satu yang membuat masyarakat khawatir adalah pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Karena berbagai tekanan dari *stakeholders* termasuk dari pemerintah dan media massa, perusahaan-perusahaan multinasional menyadari bahwa komitmen kepada tanggung jawab sosial dan lingkungan telah berubah. Paradigma baru mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terkait erat dengan tanggung jawab lingkungan. Ketiga, ketika Enron dan World.com bangkrut pada tahun 2001 dan 2002 para akademisi, legislator, dan pemimpin perusahaan mencoba mencari jalan untuk mencegah kejatuhan perusahaan-perusahaan yang lain.

### **2.1.5.3 Teori yang Melandasi *Corporate Social Responsibility***

Menurut Lako (2011:5) terdapat lima teori yang melandasi *Corporate Social Responsibility* yaitu:

1. “Teori *stakeholder*

Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup matinya suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Jika mampu, maka perusahaan akan meraih dukungan yang berkelanjutan

dan menikmati pertumbuhan pasar, penjualan, serta laba. Dalam perspektif teori *stakeholder*, masyarakat dan lingkungan merupakan *stakeholder* inti perusahaan yang harus diperhatikan.

2. Teori legitimasi

Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi social yang erat karena keduanya terikat dalam suatu “*social contract*”. Teori kontrak *Social Contract* menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak social secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat di mana masyarakat memberi *cost* dan *benefits* untuk keberlanjutan suatu korporasi. Karena itu, CSR merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat suka rela.

3. Teori sustainabilitas korporasi

Menurut teori ini, agar bias hidup dan tumbuh secara berkelanjutan, korporasi harus mengintegrasikan tujuan bisnis dengan tujuan social dan ekologi secara utuh. Pembangunan bisnis harus berlandaskan pada tiga pilar utama yaitu ekonomi, social, dan lingkungan secara terpadu, serta hidup dan memenuhi kebutuhannya. Dalam perspektif teori *corporate sustainability*, masyarakat dan lingkungan adalah pilar dasar dan utama yang menentukan keberhasilan bisnis suatu perusahaan sehingga harus selalu diproteksi dan diberdayakan.

4. *Political economy*

Menurut teori ini, domain ekonomi tidak dapat diisolasi dari lingkungan di mana transaksi-transaksi ekonomi dilakukan. Laporan keuangan (ekonomi) perusahaan merupakan dokumen *social* dan politik serta juga dokumen ekonomi. Karena tidak dapat diisolasi dari masyarakat dan lingkungan, perusahaan wajib memperhatikan dan melaksanakan CSR

5. Teori keadilan

Menurut teori ini, dalam system kapitalis pasar bebas laba/rugi sangat tergantung pada *the unequal rewards and privileges* yang terdapat dalam laba dan kompensasi. Laba/rugi mencerminkan ketidakadilan antarpihak yang dinikmati atau diderita suatu perusahaan. Karena itu, perusahaan harus adil terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang sudah turut menanggung dampak eksternalitas perusahaan melalui program-program CSR.”

#### **2.1.5.4 Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Aktivitas CSR memiliki fungsi strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (*social security*). Dengan menjalankan CSR, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga harus turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan jangka panjang.

Menurut Rusdianto (2013:13) terdapat manfaat CSR bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu:

- a. Membangun dan menjaga reputasi perusahaan.
- b. Meningkatkan citra perusahaan.
- c. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan.
- d. Mempertahankan posisi merek perusahaan.
- e. Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.
- f. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (*capital*).
- g. Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis.
- h. Mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).

Menurut Rusdianto (2013:13) bahwa :

“Keputusan perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkelanjutan, merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program CSR akan menimbulkan efek lingkaran emas yang tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, melainkan juga *stakeholder*. Bila CSR mampu dijalankan secara efektif maka dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, melainkan juga bagi masyarakat, pemerintah dan lingkungan”.

#### **2.1.5.5 Pengertian Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

Menurut Global Reporting Initiative (GRI): 2014 bahwa :

*“Voluntary disclosure of information , both qualitative, and quantitative made by organization to inform or influence a range of audience. The quantitative disclosure may be in financial or nonfinancial terms.”*

Definisi tersebut menerangkan bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan informasi sukarela, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang di buat oleh organisasi untuk menginformasikan atau mempengaruhi investor, dimana pengungkapan kuantitatif dapat berupa informasi keuangan maupun non-keuangan.

Menurut Octaviana dalam Mathews (2005:483) menyatakan bahwa bahwa :

*“ disclosure is concerned with information in both the financial statement and supplementary communication-including footnes, postatement event, management’s analysis of operation for the forthcoming financial and operating forecasts and additional financial statement covering segmental and etentions beyond historical cost.*

Menurut (Sembiring dalam Rahmawati, 2012:183) bahwa :

“Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure, corporate social reporting, social accounting*, atau *corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan”.

Menurut Pratiwi dalam Rusdianto (2013: 38) mengartikan pengungkapan *social* yaitu :

“sebagai suatu pelaporan atau penyampaian informasi kepada stakeholders mengenai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Hasil penelitian di berbagai negara membuktikan, bahwa laporan tahunan (*annual report*) merupakan media yang tepat untuk menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan pengungkapan informasi atas kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan kepada kelompok khusus yang berkepentingan atau masyarakat secara luas.

#### **2.1.5.6 Faktor – faktor yang Mempengaruhi *Corporate Social Responsibility***

Faktor-faktor yang mempengaruhi *corporate social responsibility* menurut Ilham (2010) yaitu:

1. Faktor Internal
  - a. Pada dasarnya perusahaan menyadari jika dirinya termasuk dalam kelompok sosial yang berkecimpuk di suatu tempat tertentu dan berkaitan dengan kelompok sosial lainnya.
  - b. Perusahaan menyadari jika niatan membantu sesama kelompok sosial (manusia) dan menjaga kelestarian lingkungan (Bumi) merupakan suatu tindakan yang mulia dan dianjurkan disetiap agama
  - c. Perusahaan menyadari jika dengan adanya program CSR ini maka akan berdampak positif salah satunya adalah berdampak pada kelancaran dan kelangsungan kegiatan operasional perusahaan
  - d. Perusahaan mempunyai niatan untuk mendorong karyawan supaya dapat hidup lebih disiplin, mengembangkan kemampuan untuk kemajuan perusahaan serta menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar.
2. Faktor Eksternal
  - a. Perusahaan ingin menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar perusahaan dalam hal ini masyarakat yang berdomisili dekat dengan lokasi perusahaan maupun masyarakat secara luas yang dalam hal ini diartikan masyarakat yang lokasinya jauh dari perusahaan.
  - b. Ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan melestarikan lingkungan hidup.
  - c. Perusahaan ingin berperan dalam mendorong pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan.
3. Faktor Pemerintah
  - a. Anjuran yang dilayangkan pemerintah kepada perusahaan untuk ikut berperan serta dalam menjaga dan memelihara / melestarikan kehidupan yang harmonis dengan pengelolaan limbah yang baik dan ramah lingkungan.

- b. Sebagai lembaga yang berorientasi pada pendapatan maka pemerintah menganjurkan kepada perusahaan untuk ikut berperan serta dalam hal mendukung program – program pemerintah khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan dan kelayakan hidup.
- c. Munculnya UU Perseroan Terbatas serta Keputusan Menteri Negara yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial.

### 2.1.5.7 Indikator Pengungkapan Corporate Social Responsibility

Indicator pengungkapan *corporate social responsibility* menggunakan pendekatan yang telah digunakan oleh Haniffa (2005), yaitu setiap item pengungkapan *corporate social responsibility* dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan pengungkapan *corporate social responsibility* adalah sebagai berikut:

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j} \times 100\%$$

Keterangan :

CSRI<sub>ij</sub> = Corporate Social Responsibility index perusahaan *j* tahun *i*

$\sum X_{ij}$  = Jumlah item diungkapkan perusahaan

$N_j$  = Jumlah item perusahaan *j*,  $N_j \leq 79$

### 2.1.5.8 Global Reporting Initiative (GRI)

Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia merujuk pada standar yang telah ditetapkan GRI (Global Reporting Initiative). Standar GRI dipilih

karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan sebagai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sustainability reporting ([www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)).

GRI-G4 menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung pendekatan yang terstandardisasi dalam pelaporan, yang mendorong tingkat transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat. Fitur yang ada di GRI-G4 menjadikan pedoman ini lebih mudah digunakan, baik bagi pelapor yang berpengalaman dan bagi mereka yang baru dalam pelaporan keberlanjutan dari sektor apapun dan didukung oleh bahan-bahan dan layanan GRI lainnya. (Sumber : [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)).

GRI-G4 juga menyediakan panduan mengenai bagaimana menyajikan pengungkapan keberlanjutan dalam format yang berbeda: baik itu laporan keberlanjutan mandiri, laporan terpadu, laporan tahunan, laporan yang membahas norma-norma internasional tertentu, atau pelaporan online. Jenis pendekatan pengukuran GRI-G4 melalui isi laporan tahunan dengan aspek-aspek penilaian tanggung jawab sosial yang dikeluarkan oleh GRI (Global Reporting Initiative) yang diperoleh dari website [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org).

Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, dan pemanfaatan sustainability reporting. Dalam standar GRI-G4 (2013) indikator kinerja dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu ekonomi,

lingkungan, dan sosial mencakup praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, tanggung jawab atas produk dengan total kinerja indikator mencapai 91 indikator. (Sumber : [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)). Penjelasanannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**91 Indikator Berdasarkan GRI-G4**

<b>KATEGORI</b>	<b>KODE</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>KATEGORI EKONOMI</b>		
-Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
	EC4	Bantuan financial yang diterima dari pemerintah
-Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang diperkerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
-Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
-Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan
<b>KATEGORI LINGKUNGAN</b>		
-Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang

-Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energy diluar organisasi
	EN5	Intensitas Energi
	EN6	Pengeluaran Konsumsi Energi
-Air	EN7	Konsumsi energy diluar organisasi
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
	EN10	Presentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
<b>KATEGORI</b>	<b>KODE</b>	<b>KETERANGAN</b>
-Keaneragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung.
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
	EN14	Jumlah total spesies dalam iucn res list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
-Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 1)
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
-Efluen dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan

	EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel2 Lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan presentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
<b>KATEGORI</b>	<b>KODE</b>	<b>KETERANGAN</b>
-Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa
	EN28	Presentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori -
-Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan.
-Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja
-Lain-Lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
-Asesmen Pemasok Atas Lingkungan	EN32	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
-Mekanisme Pengaduan Masala Lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
<b>KATEGORI SOSIAL</b>		
<b>SUB-KATEGORI : PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA</b>		

-Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat pengkrekrutan karyawan baru, dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender
<b>KATEGORI</b>	<b>KODE</b>	<b>KETERANGAN</b>
-Hubungan Industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
-Kesehatan dan Keselamatan Kerja	LA5	Presentase total kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
	LA7	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
-Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti

	LA11	Presentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
-Keberagaman dan Kesetaraan Peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
-Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	resentase penapisan pemasok baru menggunakan kreteria prakti ketenagakerjaan
	LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
<b>KATEGORI</b>	<b>KODE</b>	<b>KETERANGAN</b>
	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani
<b>SUB-KATEGORI : HAK ASASI MANUSIA</b>		
-Investasi	HR1	Jumlah total dan presentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk presentase karyawan yang dilatih
-Non Diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
-Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut

-Pekerja Anak	HR5	Operasi dan pemasok yang teridentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
-Pekerja Paksa Atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang teridentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
-Praktik Pengaman	HR7	Presentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi
-Hak Adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
-Asesmen	HR9	Jumlah total dan presentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia
-Asesmen Pemasok Atas Hak Asasi Manusia	HR10	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
<b>KATEGORI</b>	<b>KODE</b>	<b>KETERANGAN</b>
-Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
<b>SUB-KATEGORI MASYARAKAT</b>		
-Masyarakat Lokal	SO1	Presentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
-Anti Korupsi	SO3	Jumlah total dan presentase operasi yang dinilai terhadap resiko terkait dengan korupsi dan

		risiko signifikan yang teridentifikasi
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
-Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
-Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
-Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan
-Asesmen Pemasok	SO9	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
-Atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, di tangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
<b>SUB-KATEGORI : TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK</b>		
-Kesehatan Keselamatan Pelanggan	PR1	Presentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
<b>KATEGORI</b>	<b>KODE</b>	<b>KETERANGAN</b>
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil
-Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta presentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis

	PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
-Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
	PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promisi dan sponsor, menurut jenis hasil
-Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
-Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

Penilaian yang dilakukan dalam mengukur luas pengungkapan CSR dengan pemberian skor 0 dan 1. Dimana 0 untuk item yang tidak diungkapkan dan nilai 1 untuk item yang diungkapkan oleh perusahaan (Ho dan Taylor. 2007) dalam (Rahayu, 2016). Apabila perusahaan mengungkapkann aktivitas CSR secara penuh maka nilai maksimal yang dicapai yakni 91. Rumus perhitungan CSRI sebagai berikut :

$$CSRIj = \frac{\sum Xij}{nj} \times 100\%$$

**Keterangan:**

*CSRIj* : *Corporate Social Responsibility Index* perusahaan *j*

*Xij* : 1= jika kriteria diungkapkan; 0 = jika kriteria tidak diungkapkan

*nj* : Jumlah kriteria pengungkapan *Corporate Social Responsibility* untuk

perusahaan  $j$ ,  $n_j \leq 91$

## 2.1.6 *Leverage*

### 2.1.6.1 *Pengertian Leverage*

Leverage mencerminkan seberapa mampu suatu perusahaan bergantung pada kreditor dalam membiayai aktiva perusahaan. Rasio *leverage* mengukur tingkat aktiva perusahaan yang telah dibiayai oleh penggunaan hutang. *Leverage* keuangan dapat diartikan sebagai penggunaan aset dan sumber dana (*source of fund*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham.

Berikut merupakan pengertian rasio *leverage* menurut para ahli:

Menurut Periansya (2015:39) rasio *leverage* adalah “Rasio Solvabilitas atau rasio *leverage* (rasio utang) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh asset perusahaan dibiayai dengan hutang atau dibiayai oleh pihak lain.”

Kasmir (2016:151) mendefinisikan rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah:

“Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya, berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibanding dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membiayai seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan tersebut dibubarkan (likuidasi).”

Menurut Arief dan Edi (2016: 57) rasio *leverage* adalah:

“Rasio *Leverage* adalah rasio yang mengukur sejauh mana pembelanjaan dilakukan oleh hutang yang dibandingkan dengan modal, dan kemampuan untuk membayar bunga dan beban tetap lain.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban atau hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan tersebut di likuidasi.

#### **2.1.6.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage***

Keputusan untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah digunakan beberapa perhitungan yang matang, maka tujuan *leverage* adalah pengambilan keputusan untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman.

Menurut Kasmir (2016:153), keuntungan mengetahui *leverage* adalah:

1. Dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap;
3. Mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Guna mengambil keputusan penggunaan sumber dana ke depan.

Menurut Kasmir (2016:153), tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* adalah:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);

2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelola aktiva
6. Untuk menilai atau mengukur seberapa besar bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki;
8. Dan tujuan lainnya;

Menurut Kasmir (2016:154), manfaat *rasio leverage* adalah:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri;

### **2.1.6.3 Pengukuran *Rasio Solvabilitas* atau *Leverage***

Menurut Kasmir (2016:157) Rasio yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat *leverage* perusahaan yaitu:

#### **1. *Debt to Equity Ratio***

*Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan

peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan atau untuk mengetahui jumlah rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan uang. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Bagi bank (kreditor), semakin besar rasio ini, akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar resiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi diperusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin baik. Sebaliknya dengan rasio yang rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva. Rasio ini juga memberikan petunjuk umum mengenai kelayakan dan resiko keuangan perusahaan. Rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai *debt to equiti ratio* adalah sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Modal (Equity)}}$$

Bagi perusahaan, semakin besar rasio ini maka akan semakin baik. Sebaliknya dengan rasio yang rendah, maka semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik serta semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva.

## 2. *Debt to assets ratio (debt ratio)*

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva

perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

$$DAR = \frac{Total\ Debt}{Total\ Assets}$$

Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang.

### 3. *Long term debt to equity ratio (LTDtER)*

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri.

$$LTDtER = \frac{Long\ Term\ Debt}{Equity}$$

Tujuannya untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

### 4. *Time Interest Earned*

Menurut J.Fred Weston dalam Kasmir (2008:160) *time interest earned* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C Van Horne dalam Kasmir (2008:160) juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti *coverage ratio*. *Time interest earned* merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar

bunga, dalam jangka panjang menghilangkan kepercayaan dari para kreditor. Bahkan ketidakmampuan menutup biaya tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan adanya tuntutan hukum dari kreditor. Lebih dari itu, kemungkinan perusahaan menuju kearah pailit semakin besar. Untuk mengukur rasio ini, digunakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan biaya bunga yang dikeluarkan. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak.

$$\text{Time interest earned} = \frac{EBIT}{\text{Biaya Bunga (Interest)}}$$

#### 5. *Fixed charge coverage (FCC)*

*Fixed charge coverage* merupakan rasio yang menyerupai atau lingkup biaya tetap *time interest earned*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang.

$$\text{Fixed charge coverage} = \frac{EBIT + \text{Interest} + \text{lease}}{\text{Interest} + \text{Lease}}$$

#### **2.1.6.4 Debt to Equity Ratio**

Pemilihan *DER* untuk mengukur tingkat leverage dikarenakan *Debt to equity ratio* adalah rasio yang memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan atau keseimbangan proporsi antara aktiva yang di danai oleh

kreditor dan yang didanai oleh pemilik perusahaan sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak tertagihnya suatu utang (Prastowo dan Juliaty,2008:84).

Menurut Kasmir (2016:157) Debt to equity ratio adalah :

“Rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan atau untuk mengetahui jumlah rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan uang.”

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012: 200) *Debt to equity ratio* adalah rasio yang mengukur sejauh mana besarnya utang dapat ditutupi oleh modal sendiri.. Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total utang terhadap total modal yang dimiliki perusahaan.

### **2.1.7 Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang umum terjadi di kalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan perusahaan menganggap pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan, akhirnya perusahaan melakukan kegiatan agresivitas pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

Menurut Suyatno dan Supramono (2012:170), bahwa :

“Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*”.

Menurut Jessica dan Toly (2014) mendefinisikan agresivitas pajak adalah:

“agresivitas pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak. Dimana jika dikaitkan dengan penghindaran pajak atau penggelapan pajak, agresivitas pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak yang termasuk dalam tindakan legal, dalam upaya untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan.”

Berdasarkan penjelasannya mengenai agresivitas pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa agresivitas pajak merupakan kegiatan perencanaan yang lebih spesifik yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak secara legal atau dengan memanfaatkan *gray area* yang tidak dijelaskan secara khusus dalam undang-undang.

Menurut Pohan (2013:9) memaparkan beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak meminimumkan kewajiban pembayaran pajaknya:

1. “Tingkat kerumitan suatu peraturan Makin rumit peraturan perpajakan yang ada, maka terdapat kecenderungan untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi.
2. Besarnya pajak yang terutang Makin besar jumlah pajak yang terutang akan makin giat usaha-usaha wajib pajak untuk memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.
3. Biaya untuk negosiasi Disengaja atau tidak disengaja, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi-negosiasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.
4. Resiko deteksi Resiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah resiko deteksi, wajib pajak memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan perpajakan. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran ketentuan perpajakan mudah diketahui, maka wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.”

### 2.1.7.1 Metode Pengukuran Agresivitas Pajak

Menurut Sari dan Martani (2010) agresivitas pajak dapat diukur dengan menggunakan beberapa proksi yaitu:

1. *Effective Tax Rate*

$$ETR_{it} = \frac{\text{Total Tax Expense}_{it}}{\text{Pre - tax income}_{it}}$$

2. *Cash Effective Tax Rate*

$$CETR_{it} = \frac{\text{Cash Tax Paid}_{it}}{\text{Pre - tax income}_{it}}$$

3. *Book Tax Difference Manzon-Plesko*

$$BTD\_MP_{it} = \frac{Y_{it}^S - Y_{it}^T}{\text{Total Asset}_{it-1}}$$

4. *Book-Tax Difference Desai-Dharmapala (BTD\_DD)*

$$BTD\_DD_{it} = \beta_1 TA_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

5. *Tax Plan*

$$TAXPLAN_{it} = \frac{\sum_t^{t-2} [PT*30\% - \text{Current portion of total tax expense}]:3}{\text{Ending Asset}_t}$$

Menurut Lanis dan Richardson (2012) variabel agresivitas pajak dihitung melalui ETR (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Rumus untuk menghitung ETR Menurut Lanis and Richardson (2013) adalah sebagai berikut:

$$ETR_{it} = \frac{\text{Total Tax Expense}_{it}}{\text{Pre - tax income}_{it}}$$

Keterangan:

$ETR_{it}$  : *Effective Tax Rate* Perusahaan  $i$  pada periode ke  $t$

$Total Tax Expense_{it}$  : Jumlah beban pajak penghasilan perusahaan  $i$  pada periode ke  $t$

$Pre-tax income_{it}$  : Laba sebelum pajak perusahaan  $i$  pada periode ke  $t$

Menurut Rist dan Pizzica (2014:54) variabel agresivitas pajak dihitung melalui ETR (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Rumus untuk menghitung ETR Menurut Rist dan Pizzica (2014:54) adalah sebagai berikut:

$$ETR_{it} = \frac{Total Tax Expense_{it}}{Pre - tax income_{it}}$$

Keterangan:

$ETR_{it}$  : *Effective Tax Ratio* Perusahaan  $i$  pada periode ke  $t$ .

$Total Tax Expense_{it}$  : Jumlah beban pajak penghasilan perusahaan  $i$  periode  $t$ .

$Pre-tax income_{it}$  : Laba sebelum pajak perusahaan  $i$  pada periode  $t$ .

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus ETR bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat Agresivitas Pajak pada perusahaan. Alasan penelitian ini menggunakan rumus ETR karena beberapa penelitian sebelumnya banyak menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak. Semakin rendah nilai ETR mengidentifikasikan adanya agresivitas pajak perusahaan. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan yang lebih kecil daripada pendapatan sebelum pajak. Rist dan Pizzica (2014:54) menyatakan bahwa:

“bahwa ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada penelitian terdahulu. Proksi ETR dinilai menjadi indikator adanya

agresivitas pajak apabila memiliki ETR yang mendekati nol. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.”

#### **2.1.7.2 *Effective Tax Rates (ETR)***

Pemilihan *Effective Tax Rates (ETR)* di karenakan “ETR adalah proksi yang paling banyak di gunakan dalam penelitian terdahulu untuk mengetahui seberapa besar perusahaan melakukan agresivitas pajak” (Lanis dan Richardson,2012). ETR adalah proksi negatif. Dimana jika ETR tinggi maka agresivitas pajak nyarendah, sedangkan bila ETR rendah maka agresivitas pajaknya tinggi.

#### **2.1.8 Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Penulis menggunakan beberapa jurnal sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh Likuiditas, *Corporate Social Responsibility*, dan *Leverage*, Terhadap Agresivitas Pajak.

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai Likuiditas, *Corporate Social Responsibility*, dan *Leverage*, Terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal-jurnal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah, berikut ini penulis menyajikan tabel 2.2 penelitian terdahulu yang mendukung penulis:

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>PENELITIAN (TAHUN)</b>	<b>JUDUL</b>	<b>HASIL</b>
1	Michelle Hanlon and Joel Slemrod (2008)	<i>What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reaction to news about tax shelter involvement</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Agresivitas pajak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap harga saham.
2	Balakrishnan and Blouin (2011)	<i>Does tax aggressiveness reduce financial reporting transparency?</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Agresivitas pajak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap transparansi keuangan.
3	Roman Lanis and Grant Richardson (2012)	<i>Corporate Social Responsibility and tax aggressiveness: an empirical analysis</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: <i>Corporate Social Responsibility</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas pajak.
4	Yoehana (2013)	<i>Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap agresivitas pajak</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: <i>Corporate Social Responsibility</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas pajak.
5	Ardyansyah dan Zulaikha (2014)	<i>Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris independen terhadap Effective Tax Rate (ETR)</i>	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: <i>Size</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . <i>Profitability</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . <i>Capital Intensity Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax</i>

			<p><i>Rate</i>. Komisaris Independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i>.</p>
6	Novia Bani Nugraha (2015)	<p>Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i>, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak</p>	<p>Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: <i>Corporate Social Responsibility</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Profitabilitas memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak. <i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas Pajak. <i>Capital Intensity</i> memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak.</p>
7	Irvan Tiaras dan Henryanto (2015)	<p>Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i>, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak</p>	<p>Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Manajemen Laba memiliki pengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas Pajak</p>

8	Nona Fajar Rina (2015)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Return <i>On Asset</i> dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Return <i>On Asset</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Kepemilikan Keluarga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Agresivitas Pajak.
9	Juniati Gunawan (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Agresivitas Pajak	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
10	Mustika (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak	Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: <i>Corporate Social Responsibility</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memiliki peranan sangat besar dalam menopang pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar penerimaan pajak dapat diterima secara maksimum. Namun hal itu tidak sejalan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak yang menganggap pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Karena perbedaan tujuan antara pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak yang maksimum, sedangkan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak yang minimum maka timbul ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun dengan cara memanfaatkan *gray area*. Walaupun tidak semua tindakan perencanaan pajak melanggar hukum, akan tetapi semakin banyak celah yang digunakan perusahaan tersebut dianggap semakin agresif.

Kerangka penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu Likuiditas, pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, dan *Leverage* terhadap variabel dependen, yaitu agresivitas pajak. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **2.2.1 Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak**

Suyanto (2012) menemukan adanya pengaruh likuiditas terhadap tingkat agresivitas pajak. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan tersebut dalam kondisi yang sehat. Perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi akan memiliki peningkatan modal (persediaan bersih) yang tinggi. Dengan tingkat pendapatan yang tinggi, perusahaan dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah biaya yang dikeluarkan (Yusriwati, 2012) dalam Adisamartha dan Noviari (2015).

Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan maka perusahaan akan semakin membutuhkan untuk mengalokasikan laba periode berjalan ke periode selanjutnya dengan alasan tingkat pembayaran pajak yang tinggi. Maka dari itu, untuk mengurangi laba akan semakin meningkat dengan alasan untuk menghindari pajak yang meningkat. Lebih besar rasio likuiditas maka akan berbanding positif dengan tingkat agresivitas pajak perusahaan.

$H_1$  : Likuiditas memberikan pengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan.

### **2.2.2 Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak**

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Dengan membayar pajak berarti perusahaan telah berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan nasional guna kesejahteraan

masyarakat luas. Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan bukan hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun memberikan manfaat bagi stakeholder. Karena keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan para *stakeholder*. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapat dukungan dari *stakeholder*.

Lako (2011:73) menyatakan hubungan antara *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak sebagai berikut:

“Terdapat motif tersembunyi yang dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan CSR. Sebagai contoh agar bisa menghindari membayar pajak yang terlalu besar kepada negara karena mendapatkan fasilitas insentif pajak, sementara di sisi lain perusahaan justru akan mendapatkan nama baik sebagai perusahaan yang dermawan dan meningkatkan reputasinya karena melakukan CSR.”

Hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dengan agresivitas pajak menurut Octaviana (2014) sebagai berikut:

“Selama ini perusahaan beranggapan memiliki dua beban yang sama yaitu beban pajak dan beban CSR. Pada dasarnya kedua beban tersebut digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun agar perusahaan tidak memiliki dua beban maka perusahaan mulai mencari cara untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak. Tindakan tersebut tentu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu untuk menutupi tindakan tersebut perusahaan melaksanakan tanggung jawab social lebih besar kepada masyarakat untuk mengubah persepsi dan memperoleh legitimasi dari masyarakat.”

Lanis dan Richardson (2012) menyatakan hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak sebagai berikut:

*“This shortfall in corporate income tax revenue generates hostility, reputational damage (particularly in relation to its CSR profile) for a corporation with various stakeholders, and at worst could even result in the cessation of a corporation’s business operations.”*

Adapun hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dengan agresivitas pajak menurut Juniati Gunawan (2017) sebagai berikut:

*“Perusahaan yang mengungkapkan corporate social responsibility lebih banyak akan cenderung melakukan agresivitas pajak karena perusahaan yang melakukan agresivitas pajak berusaha melakukan pengalihan perhatian sehingga mengungkapkan aktivitas CSR lebih luas untuk mendapat citra positif dari para stakeholder.”*

### **2.2.3 Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan teori keagenan, hutang dapat digunakan oleh manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga dari hutang tersebut. Pada peraturan perpajakan pasal 6 ayat 1 UU No.36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang.

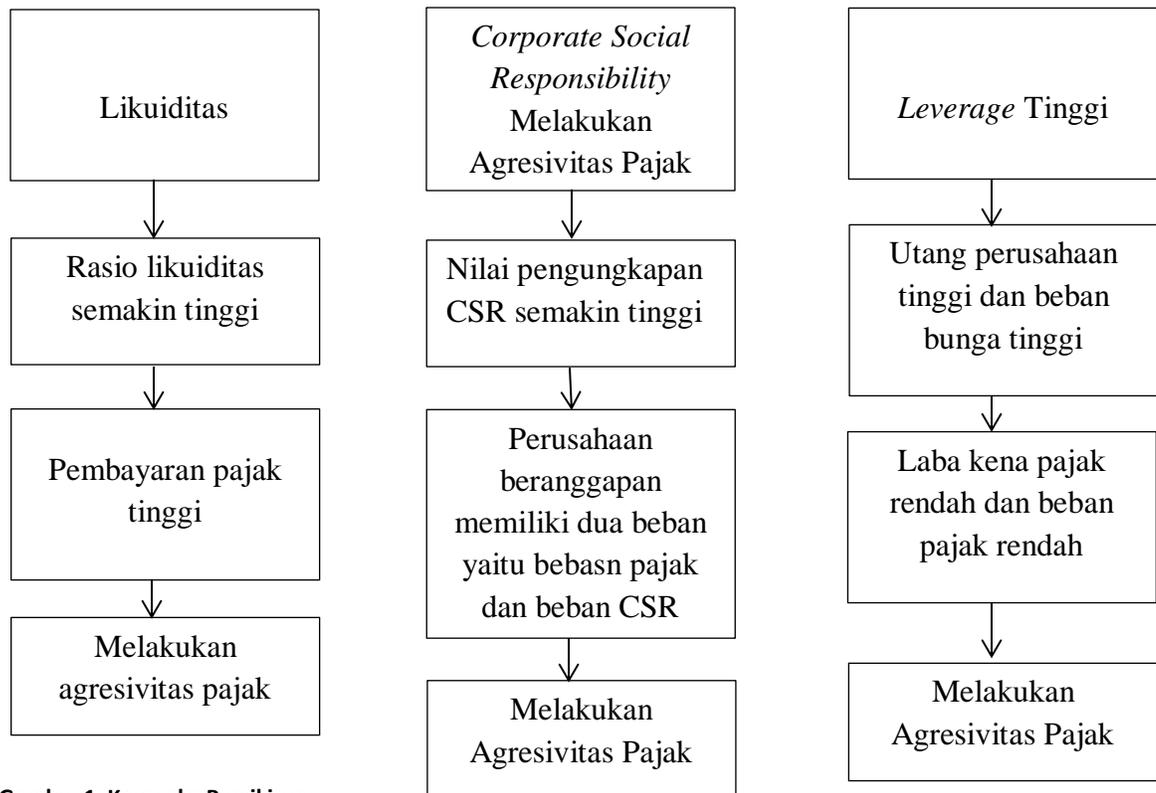
Secara logika, semakin besar nilai dari rasio leverage, artinya semakin meningkat pula jumlah pendanaan yang berasal dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya biaya bunga yang disebabkan dari utang tersebut. Biaya bunga yang meningkat dapat menyebabkan pajak yang ditanggung perusahaan menjadi berkurang (Kurniasih dan Sari, 2013). Rahmawati (2017) menyatakan bahwa diperkirakan Wajib Pajak cenderung

menggunakan *leverage* yang tinggi untuk dapat meminimalisasi pajak yang harus dibayarkan. Penelitian Ozkan (2001) dalam Agustina (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Jika dengan sengaja perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak, maka dapat disebutkan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajaknya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat dari Noor, et al.,(2010) yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki nilai *effective tax rate* (ETR) yang lebih rendah dan agresivitas pajak akan meningkat karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Uraian diatas didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) dan Djeni Indrajati (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Beberapa penelitian terkait anatar likuiditas, *corporate social responsibility*, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya hubungan positif dan juga ada yang negatif. Sesuai dengan judul penelitian “Likuiditas, pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak” maka model kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan Kerangka pemikiran, Maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : Likuiditas memberikan pengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan.

H<sub>2</sub> :“Terdapat Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak”.

H<sub>3</sub> :Leverage berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak

